

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, perkembangan harga di Kabupaten Cirebon menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat menjelang akhir tahun. Perkembangan harga di Kabupaten Cirebon mengacu pada inflasi Kota Cirebon sebagai kota IHK terdekat, yang pada bulan Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar **0,32% (mtm)**. Kondisi tersebut turut memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Cirebon sebagai wilayah non-IHK.

Sebagai indikator perkembangan harga, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Cirebon menunjukkan pola sebagai berikut:

- **Oktober 2025:**
  - Minggu ke-3 sebesar **1,26%** dan
  - Minggu ke-4 sebesar **1,18%**;
- **November 2025:**
  - Minggu ke-1 sebesar **-1,15%**,
  - Minggu ke-2 sebesar **-1,19%**,
  - Minggu ke-3 sebesar **-0,96%**, dan
  - Minggu ke-4 sebesar **-0,68%**;
- **Desember 2025:**
  - Minggu ke-1 sebesar **1,46%**,
  - Minggu ke-2 sebesar **2,70%**,
  - Minggu ke-3 sebesar **3,42%**, dan
  - Minggu ke-4 sebesar **3,50%**.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada bulan November 2025 terjadi penurunan harga (deflasi IPH) akibat masuknya masa panen beberapa komoditas pangan, sementara pada bulan Desember 2025 terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Komoditas utama yang menjadi penyumbang kenaikan harga di Kabupaten Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain:

- Daging ayam ras;
- Cabai merah; dan
- Telur ayam ras.

Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara umum, ketersediaan pasokan bahan pangan strategis di Kabupaten Cirebon selama Triwulan IV Tahun 2025 masih dalam kondisi aman. Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan guna menghindari terjadinya kelangkaan bahan pokok, khususnya menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

Upaya monitoring dilakukan secara rutin di pasar daerah, distributor, dan pemasok komoditas strategis untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

Risiko inflasi yang teridentifikasi pada Triwulan IV Tahun 2025 dan perlu diantisipasi ke depan antara lain:

- Tingginya permintaan masyarakat menjelang HBKN;
- Ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi pada komoditas tertentu;
- Fluktuasi harga pangan strategis, khususnya protein hewani dan hortikultura;
- Potensi gangguan distribusi dan pasokan.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu tingginya permintaan (demand) di tingkat konsumen yang tidak sepenuhnya seimbang dengan kapasitas produksi, khususnya pada komoditas yang memiliki andil besar terhadap perkembangan harga.

Pada bulan November 2025, harga beberapa komoditas mengalami penurunan seiring dengan masa panen beras, bawang, dan cabai merah besar. Namun demikian, pada bulan Desember 2025 harga kembali mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah selama Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan berbagai upaya berdasarkan kerangka **4K**, yaitu:

### 1. **Keterjangkauan Harga**

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah (OPM)/Bazar Murah, serta Operasi Pangan Daerah (OPADI).

### 2. **Ketersediaan Pasokan**

Fasilitasi sarana produksi pertanian seperti benih dan pupuk bersubsidi, serta optimalisasi panen dan pasca panen untuk mengurangi losses.

### 3. **Kelancaran Distribusi**

Pelaksanaan sidak ke pasar-pasar daerah untuk monitoring harga dan ketersediaan pasokan, serta sidak ke distributor dan supplier daging untuk memastikan kecukupan stok.

### 4. **Komunikasi Efektif**

Penguatan koordinasi antar instansi serta optimalisasi penyampaian informasi harga pangan melalui aplikasi **SiKepokmas** dan **SiKompa**.

## 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan secara intensif melalui berbagai langkah, antara lain:

- Perumusan kebijakan daerah berupa penyusunan rancangan *road map* pengendalian inflasi daerah;

- Pelaksanaan rapat teknis dan koordinasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru;
- Penguatan sinergi dan kolaborasi antara Kepala Daerah, Forkopimda, serta perangkat daerah yang tergabung dalam TPID.

Langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun 2025, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Penguatan data produksi untuk mengatasi permasalahan di sisi hulu;
2. Pembentukan BUMD Pangan sebagai upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan stok pangan;
3. Peningkatan produktivitas untuk menjaga kontinuitas hasil panen sepanjang tahun;
4. Perbaikan tata kelola kemitraan sebagai bentuk perlindungan dan peningkatan kualitas kerja sama;
5. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika inflasi yang fluktuatif.